

BAB II

PENGELOLAAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SD ISLAM AL AZHAR 29 SEMARANG

A. Pengelolaan Komite Sekolah

1. Konsep Dasar Pengelolaan

a. Pengertian

Pengelolaan merupakan kata lain dari manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management*, akar katanya adalah *manage* yang memiliki arti mengatur, mengurus, melaksanakan, mengelola.¹

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah *managing* atau pengelolaan, sedang pelaksanaannya disebut *manager* atau pengelola.²

Manajemen menurut Houghton sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Ismat Mutowi dan Amin Ahmad Khasan dalam buku *al-Ushul al-Idaroyati littarbiyyah*, bahwa:

عَفْدُوَّةَ اِق الرَّوْمِيَّةِ وَالَّتِي لَعَّ قُلُوبَ يَنْدَالٍ خَلَاطِصًا لِيَّ هِيَ عَارِدَالِي نَّإِ

قَاتِنَا لِمَا فِي لِي مَعَ اَللِّي اِقْتَمَمِ اَلْعَ يَوْفَا

Yang dimaksud dengan manajemen adalah suatu aktifitas yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan, dan penerahan segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktifitas dalam suatu organisasi.

¹ John M. Echols dan Hasan Shadaly, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), hlm. 372.

² George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi aksara, 2003), Cet. VIII, hlm.1.

³Ibrahim Ismat Mutowi dan Amin Ahmad Khasan, *Al-Ushul Al-Idharoh Littarbiyah*, (Riyad: Dar al-Syurq, 1998/1416 H), hlm. 8.

Henry L. Sisk mendefinisikan “*Management is the coordination of all resources through the processes of planning, organizing, directing, and controlling in order to attain stated objectives*”.⁴

Manajemen adalah mengkoordinasikan semua sumber-sumber melalui proses-proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan di dalam ketertiban untuk tujuan.

b. Fungsi-fungsi Manajemen

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, seefektif dan seefisien mungkin. Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya.⁵

Perencanaan dan rencana sangat penting, karena: 1) tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang dicapai; 2) tanpa perencanaan dan rencana tidak ada pedoman pelaksanaan, sehingga banyak pemborosan; 3) rencana adalah dasar pengendalian, karena tanpa adanya rencana pengendalian tidak dapat dilakukan; 4) tanpa adanya perencanaan dan rencana, berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada.⁶

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian ialah 1) penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi; 2) proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat membawa hal-hal tersebut kearah tujuan; 3) penugasan tanggung jawab tertentu; 4) pendelegasian wewenang yang

⁴Henry L. Sisk, *Principles Of Management A Sistem Approach to the Management Process*, (Chicago: Publishing Company, 1969), hlm. 10.

⁵Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), Cet.VII, hlm.49.

⁶Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: dasar pengertian dan masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), cet.IV, hlm.91.

diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian lain tentang pengorganisasian ialah pengaturan kerja sama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya.⁷

3) Penggerakan/Pelaksanaan (*Actuating*)

Penggerakan merupakan aktualisasi dari perencanaan dan pengorganisasian secara konkrit. Perencanaan dan pengorganisasian tidak akan mencapai tujuan yang ditetapkan tanpa adanya aktualisasi dalam bentuk kegiatan. Perencanaan bagaikan garis start dan penggerakan adalah Bergeraknya mobil menuju tujuan yang diinginkan berupa garis finish, garis finish tidak akan dicapai tanpa adanya gerak mobil.

Berdasarkan rencana aksi, penanggung jawab program kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun. Dalam pelaksanaan program, dibutuhkan suatu pengarahan dari pimpinan, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Pengarahan yang dilakukan sebelum memulai bekerja, berguna untuk menekankan hal-hal yang perlu ditangani, urutan prioritas, prosedur kerja dan lain-lainnya agar pelaksanaan pekerjaan dapat efektif dan efisien. Pengarahan yang dilakukan selama melaksanakan tugas bagi orang-orang yang terlibat dimaksudkan untuk mengingatkan ataupun meluruskan apabila terjadi penyelewengan atau penyimpangan.⁸

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan pengontrol kegiatan yang telah dilaksanakan, apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Pengawasan diterapkan dalam fungsi manajemen, agar

⁷ Husaini Usman, *lock.cit.*, hlm.141.

⁸ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), cet.IV, hlm.12.

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan tidak melenceng dari perencanaannya, walaupun ada penyimpangan-penyimpangan maka dilakukan perbaikan.

Pengawasan adalah kegiatan untuk mengetahui realisasi pelaku personel dalam organisasi, dan apakah tingkat pencapaian tujuan sesuai dengan yang dikehendaki, serta hasil pengawasan tersebut apakah dilakukan perbaikan.⁹ Dalam kegiatan ini juga dilaporkan factor-faktor pendukung dan penghambat kerja, sehingga memudahkan usaha perbaikan. Jadi, pengawasan ini dilihat dari segi input, proses, output bahkan outcomenya telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau belum sesuai tujuan yang ditetapkan.

5) Penilaian (*Evaluating*)

Evaluasi artinya menilai semua kegiatan untuk menemukan indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. Dalam mengkaji masalah yang dihadapi, rumuskan solusi alternatif yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan meningkatkan kualitas keberhasilan dimasa yang akan datang. Evaluasi sebagai fungsi manajemen merupakan aktifitas untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, perbaikan dan pencarian solusi yang tepat dapat ditemukan dengan mudah.¹⁰

6) Penganggaran (*Budgetting*)

Penganggaran merupakan rencana detail mengenai perolehan dan penggunaan keuangan maupun sumber daya

⁹ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: CV. Alfabet, 2000), hlm. 59.

¹⁰ Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), cet.I, hlm.124.

organisasi lainnya pada periode yang telah ditentukan. Anggaran merupakan representasi dari perencanaan masa depan organisasi yang disusun dalam bentuk laporan formal secara kuantitatif. Ada dua hal yang perlu dicermati berkaitan dengan anggaran, yaitu perencanaan dan pengontrolan biaya.

Beberapa manfaat yang dapat dipetik oleh organisasi yang melakukan penganggaran, antara lain:

- a) Anggaran mengomunikasikan rencana manajemen ke seluruh bagian di dalam organisasi;
 - b) Anggaran akan memaksa manajer untuk memikirkan masa depan organisasi dan merencanakan bagaimana cara mencapainya;
 - c) Proses penganggaran akan mengalokasikan sumber daya organisasi ke seluruh bagian organisasi secara efektif dan efisien;
 - d) Proses penganggaran akan meminimalisir terjadinya aktifitas yang kurang optimal;
 - e) Anggaran akan mengoordinasi aktifitas-aktifitas di dalam organisasi dengan mengintegrasikan rencana di masing-masing bagian;
 - f) Anggaran akan mendefinisikan tujuan dan sasaran yang akan menjadi *benchmarks* dalam mengevaluasi kinerja organisasi.
- 7) Motivasi (*Motivating*)

Motivasi merupakan salah satu alat atasan agar bawahan mau bekerja keras dan bekerja cerdas sesuai dengan yang diharapkan. Pengetahuan tentang pola motivasi membantu para manajer memahami sikap kerja pegawai masing-masing. Manajer dapat memotivasi pegawainya dengan cara berbeda-beda sesuai dengan pola masing-masing yang paling menonjol. Bawahan perlu dimotivasi karena ada bawahan yang baru mau bekerja setelah dimotivasi atasannya. Motivasi yang timbul dari luar disebut

motivasi ekstrinsik. Di pihak lain, ada pula bawahan yang bekerja atas motivasi dari dirinya sendiri. Motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri disebut *motivasi intrinsik*. Motivasi intrinsik biasanya lebih bertahan lama dan efektif dibandingkan motivasi ekstrinsik.¹¹

8) Pemberdayaan (*Empowering*)

Pemberdayaan merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh pimpinan untuk mengoptimalkan fungsi dan peran warga yang dipimpinya. Pemberdayaan merupakan pemberian wewenang kepada karyawan untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tentang pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, tanpa harus mendapatkan otorisasi secara eksplisit dari manajer di atasnya.¹²

Pemberdayaan bukan sekedar melibatkan karyawan, tetapi melibatkan mereka dengan memberikan pengaruh yang sungguh-sungguh berarti. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun pekerjaan yang memungkinkan para karyawan untuk mengambil keputusan mengenai perbaikan proses pekerjaannya dengan parameter yang ditetapkan dengan jelas.¹³

2. Konsep dasar Komite Sekolah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 diterangkan bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.¹⁴ Kemudian pada pasal 56 ayat 3 diterangkan kembali

¹¹ Husaini Usman, *Manajemen teori Praktik & Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), ed.II., hlm.244.

¹² Gunawan sudarmanto, "Optimalisasi pemberdayaan unsur-unsur terkait pengelolaan sekolah yang mandiri dan berkualitas" <http://blog.unila.ac.id/radengunawans/Manajemen-Pendidikan.pdf>, akses: 07/07/2010.

¹³ Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, *TQM: Total Quality Management*, (Yogyakarta: Andi, 2003), Ed.V, hlm.18.

¹⁴ Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta: Depag RI, 2006), hlm.8.

bahwa Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.¹⁵

Pemaparan lebih lanjut mengenai Komite Sekolah dijelaskan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002, sebagai berikut.¹⁶

a. Pengertian, nama, dan ruang lingkup

- 1) Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;
- 2) Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing- masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.
- 3) Bp3, Komite Sekolah dan/atau majelis sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan ini.

b. Tujuan Komite Sekolah

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

¹⁵ *Ibid*, hlm.37.

¹⁶ http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/docs/dok_16.pdf, *Lampiran Kepmendiknas nomor: 044/U/2002*, Akses: 01/03/2010.

- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

c. Peran dan fungsi Komite Sekolah

Komite Sekolah berperan sebagai:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- 2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
- 4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a) kebijakan dan program pendidikan;
 - b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c) kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d) kriteria tenaga kependidikan;
 - e) kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - f) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;

- 5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
- d. Tata hubungan antar organisasi

Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dengan Komite-Komite Sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.

Komite Sekolah bukan lembaga birokrasi baru. kedudukan Komite Sekolah sama sekali tidak berada di bawah atau di atas kepala sekolah, melainkan sejajar. Komite Sekolah juga sama sekali bukan sebagai institusi pemerintah, yang harus membuat pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. atasan langsung Komite Sekolah tak lain adalah orang tua dan masyarakat. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang menjadi wadah peran serta orang tua dan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sekolah.¹⁷

3. Pengelolaan Komite Sekolah

Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah organisasi, mulai dari perencanaan program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan program kerja, dan evaluasi program kerja, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah agar tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

¹⁷ Sri Renani Pantjastuti dkk., *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), cet.I, hlm. 95.

Sebuah Komite Sekolah dapat menjalankan roda organisasi melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut barangkali ada yang belum menyentuh substansi peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah konsolidasi organisasi. Kegiatan lain adalah misalnya penyusunan Panduan Organisasi atau Penyusunan AD/ART atau melengkapi kelengkapan organisasi.¹⁸

Komite Sekolah yang telah memenuhi syarat minimal sebagai sebuah organisasi, dapat melangkah lebih jauh dalam menjalankan roda organisasi, dan mulai menyentuh substansi mutu pendidikan. Dalam hal ini Komite Sekolah dapat memulai kegiatannya dengan berangkat dari upaya pemecahan masalah yang dapat diidentifikasi. Berikut ini tahap-tahap yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah.¹⁹

a. Identifikasi masalah.

Setiap sekolah atau satuan pendidikan tentu memiliki masalah yang berbeda-beda. Langkah yang perlu dilakukan oleh Komite Sekolah dalam menjalankan roda organisasi adalah identifikasi masalah, baik masalah akademik, maupun masalah non-akademik. Dapat dipastikan bahwa akan banyak sekali masalah yang dapat diidentifikasi.

b. Menentukan prioritas.

Dari sekian banyak masalah yang berhasil diidentifikasi harus dipilih masalah yang akan menjadi prioritas, dikaitkan dengan ketersediaan personel, dana, dan penunjang.

c. Analisis masalah.

Guna mengetahui secara lebih mendalam tentang masalah yang terjadi, perlu dilakukan analisis masalah. Dalam masalah atau topik yang akan ditangani langkah-langkah yang perlu dilakkan adalah sebagai berikut:

¹⁸Ngadino, *Optimalisasi Peran Komite Sekolah*, <http://www.suarakomunitas.net/?lang=id&rid=21&id=2796>. Akses: 07/04/2010.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Modul 2: Peningkatan Kemampuan Organisasional komite sekolah*, <http://www.ziddu.com/download/5677996/modul2.doc.html>, akses: 07/04/2010.

- Lakukan identifikasi faktor-faktor penyebab masalah tersebut,
- Buat daftar alternatif kemungkinan pemecahan masalah dan untung rugi masing-masing alternatif
- Pilih alternatif terbaik berdasarkan kesepakatan bersama
- Buat perencanaan untuk pemecahan masalah.

d. Perencanaan program

Pelaksanaan Program dapat dilakukan dengan baik apabila dibuat rencana aksi yang baik. Berikut ini contoh sebuah rencana aksi yang dapat diacu.

Topik Masalah	Kegiatan yang dapat mengatasi masalah	Waktu yang dibutuhkan	Sumberdaya yang diperlukan	Penanggung jawab	Indikator keberhasilan pemecahan masalah
Masalah A	1. 2.				
Masalah B	1. 2.				

e. Pelaksanaan Program/Kegiatan

Berdasarkan rencana aksi, penanggung jawab program kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun.

f. Evaluasi program

Selama berjalannya waktu dilakukan evaluasi secara periodik. Setelah tenggat waktu periode tertentu terlewati tetapi indikator kinerja masih di bawah target, perlu dilakukan analisis dan dibuat tindakan koreksi (*corrective action*). Dalam hal ini ada baiknya dilakukan siklus perencanaan : Plan → Do → Check → Action, yang kini banyak dianut oleh berbagai organisasi dalam menjalankan program dan kegiatan organisasinya.

Dalam menjalankan pengelolaan, dibutuhkan tenaga yang profesional agar setiap pekerjaan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Rasulullah saw bersabda dalam hadits yang berbunyi :

ي اللهُ عَلَيْهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

رَوَاهُ) وَسَلَّم: إِذَا وُجِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

(البخارى)

Dari abu Hurairah r.a. ia berkata : Rasulullah saw telah bersabda : Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya” (HR. Bukhari).²⁰

Penyusunan program kerja Komite Sekolah perlu memperhatikan atau berdasarkan beberapa hal sebagai berikut.²¹

- 1) Program kerja komite merupakan penjabaran operasional dari peran dan fungsi Komite Sekolah. Program kerja Komite Sekolah jangan sampai keluar dan harus tetap dalam koridor yang tertuang dalam peran dan fungsi Komite Sekolah.
- 2) Berdasarkan data dan informasi yang akurat yang diperoleh dari kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi oleh sekolah. Proses penyusunan program kerja Komite Sekolah perlu mempertimbangkan masukan dan pertimbangan dari sekolah.
- 3) Sesuai dengan kaidah penyusunan program kerja pada umumnya, program Komite Sekolah disusun menganut kaidah SMART (*specific, measurable, achievable, dan time frame*), yakni a) spesifik, b) dapat diukur keberhasilan dan taraf pencapaiannya, c) dapat dicapai dan dapat diperoleh, d) berorientasi pada hasil dan proses, e) dengan jadwal yang jelas.

²⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1992), Juz I, hlm. 21.

²¹ Sri Renani Pantjastuti dkk., *op.cit.*, hlm.100-101.

4) Pelaksanaan program kerja Komite Sekolah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Salah satu prinsip Komite Sekolah adalah akuntabilitas. Oleh karena itu hasil pelaksanaan program kerja Komite Sekolah harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada orang tua tetapi juga kepada masyarakat. Sekolah dan Komite Sekolah harus membuat laporan pertanggungjawaban secara periodic atau setiap akhir tahun pelajaran kepada orang tua siswa dan masyarakat.

Secara lebih rinci, Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah dalam Hasbullah melukiskan beberapa indikator dari peran Komite Sekolah sebagai berikut.²²

Tabel. 01
Indikator Peran Komite Sekolah

Peran Komite Sekolah	Fungsi manajemen	Indikator Kinerja
Sebagai <i>advisory agency</i>	1. Perencanaan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat; • Memberikan masukan RAPBS; • Menyelenggarakan rapat RAPBS; • Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS; • Ikut mensahkan RAPBS bersama kepala sekolah.
	2. Pelaksanaan program a. kurikulum b. PBM c. Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah; • Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru-guru.
	3. Pengadaan sumber daya pendidikan (SDM, S/P, Anggaran)	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat; • Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan

²² Hasbullah, *Otonomi Pendidikan : kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 96-98.

		<p>yang dapat diperbantukan di sekolah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diadakan di sekolah; • Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.
Sebagai badan pendukung (<i>supporting agency</i>)	1. Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan terhadap kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah; • Mobilisasi guru sukarelawan di sekolah; • Mobilisasi tenaga kependidikan non guru di sekolah; • Memantau kondisi sarana/prasarana di sekolah.
	2. Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi bantuan sarana/prasarana di sekolah; • Evaluasi pelaksanaan dukungan.
	3. Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah. • Mobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah; • Koordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah; • Evaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.

Peran Komite Sekolah	Fungsi manajemen	Indikator Kinerja
Sebagai badan pengontrol	1. Control terhadap Perencanaan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di sekolah; • Penilaian terhadap kualitas kebijakan di sekolah; • Pengawasan terhadap proses perencanaan di sekolah;

		<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah; • Pengawasan terhadap kualitas program sekolah.
	2. Kontrol terhadap pelaksanaan program sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan terhadap organisasi sekolah; • Pengawasan terhadap penjadwalan program sekolah; • Pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah; • Pengawasan terhadap sumber daya pelaksana program sekolah; • Pengawasan terhadap partisipasi sekolah terhadap program sekolah.
	3. Kontrol terhadap <i>output</i> pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • penilaian terhadap hasil Ujian Nasional; • penilaian terhadap angka partisipasi sekolah; • penilaian terhadap angka mengulang sekolah; • penilaian terhadap angka bertahan di sekolah.
Mediator Agency	1. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi penghubung antara KS dengan masyarakat, KS dengan Dewan Pendidikan, serta KS dengan sekolah; • Identifikasi aspirasi pendidikan dalam masyarakat; • Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah.
	2. Pelaksanaan program	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kebijakan dan program pendidikan sekolah terhadap pendidikan masyarakat; • Memfasilitasi berbagai masukan terhadap kebijakan program terhadap sekolah; • Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan; • Mengkomunikasikan

		pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah.
	3. Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kondisi sumber daya di sekolah; • Identifikasi sumber daya masyarakat; • Mobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah; • Koordinasi bantuan masyarakat.

Sumber: *Hasbullah, Otonomi Pendidikan, hlm. 96-98.*

Apabila Komite Sekolah sudah dapat melaksanakan keempat perannya tersebut secara baik, diasumsikan bahwa Komite Sekolah tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, keberadaan dan peran Komite Sekolah perlu menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan persekolahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.²³

Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah organisasi, mulai dari perencanaan program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan program kerja, dan evaluasi program kerja, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah agar tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan Komite Sekolah merupakan penjabaran dari peran dan fungsi Komite Sekolah yang telah disebutkan di atas. Jika dalam pengelolaan Komite Sekolah telah mampu melaksanakan Peran dan Fungsinya sebagai Komite Sekolah, maka dapat dikatakan pengelolaan itu telah berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tujuan Komite

²³ *Ibid.*, hlm. 99.

Sekolah yang telah diatur dalam Undang-Undang yakni Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 044/U/2002.

B. Mutu Pendidikan

1. Konsep Mutu

Bagi setiap institusi, mutu adalah agenda utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling penting. Walaupun demikian, ada sebagian orang yang menganggap mutu sebagai sebuah konsep yang penuh dengan teka-teki. Mutu dianggap sebagai suatu hal yang membingungkan dan sulit untuk diukur. Mutu dalam pandangan seseorang terkadang bertentangan dengan mutu dalam pandangan orang lain, sehingga tidak aneh jika ada dua pakar yang tidak memiliki kesimpulan yang sama tentang bagaimana cara menciptakan institusi yang baik.²⁴

Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik dan benar; merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Dalam definisi yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Produk-produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang mahal.²⁵

Mutu dalam pengertian relatif bukanlah suatu sebutan untuk suatu produk atau jasa, tetapi pernyataan bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi persyaratan atau kriteria, atau spesifikasi yang ditetapkan. Produk atau jasa tersebut tidak harus terbaik, tetapi telah memenuhi standar yang ditetapkan. Mutu dalam pengertian relatif memiliki dua aspek. *Pertama* mutu diukur dan dinilai berdasarkan persyaratan kriteria dan spesifikasi (standar-standar) yang telah ditetapkan lebih dulu. *Kedua*, konsep ini mengakomodasi keinginan konsumen atau pelanggan, sebab di dalam penetapan standar produk dan atau jasa yang akan dihasilkan memperhatikan syarat-syarat yang dikehendaki pelanggan, dan

²⁴ Edward Sallis, *Total Quality Management In Education*, terjemahan Dr. Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, M.Ag dan (Yogyakarta: IRCISOD, 2006), hlm.29.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

perubahan-perubahan standar antara lain juga didasarkan atas keinginan konsumen/pelanggan, bukan semata-mata kehendak produsen.²⁶

Kata “Mutu” berasal dari Bahasa Inggris “*quality*” yang berarti kualitas.²⁷ *Quality is the totality of features and other characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs.*²⁸

Definisi tentang mutu sangat beragam dengan sudut pandang yang berbeda namun memiliki hakekat yang sama. Dalam membahas definisi mutu kita perlu mengetahui definisi mutu produk yang disampaikan oleh lima pakar Manajemen Mutu Terpadu (*Total Quality Management*). Berikut ini definisi-definisi tersebut :

- a. Juran menyebutkan bahwa mutu produk adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
- b. Crosby mendefinisikan mutu adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan.
- c. Deming mendefinisikan mutu, bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar.
- d. Feigenbaum mendefinisikan mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya.
- e. Garvin dan Davis menyebutkan bahwa mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen.²⁹

Mutu adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan

²⁶ Umadi, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah*, (Ciputat: Pusat Kajian Manajemen mutu pendidikan, 2004), Ed.I, Hlm.162-163

²⁷John M. Echols dan Hasan Shadhily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1976., hlm. 327.

²⁸ Glossary Terms, <http://www.qaproject.org/methods/resglossary.html>, Akses:13/05/2010

²⁹Rita H., *Definisi Mutu*, <http://weblog-pendidikan.blogspot.com/2009/08/definisi-mutu.html>, Akses: 13/04/2010.

yang akan atau yang tersirat. Lebih luas lagi Mutu adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan hubungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.³⁰

Dari beberapa definisi mutu di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Mutu meliputi usaha memenuhi kebutuhan atau melebihi kebutuhan atau harapan pelanggan.
- b. Mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan.
- c. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan mutu saat ini, mungkin dianggap kurang bermutu pada masa mendatang).

Sedangkan mutu di bidang pendidikan meliputi mutu *input*, proses, *output*, dan *outcome*. *Input* pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEMB (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, dan Bermakna). *Output* dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik siswa tinggi. *Outcome* dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas.

Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena 1) meningkatkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan atau pemerintah yang telah memberikan semua biaya kepada sekolah, 2) menjamin mutu lulusannya, 3) bekerja lebih professional, dan 4) meningkatkan persaingan yang sehat.³¹

2. Faktor yang Mempengaruhi Mutu

Mutu tidak terjadi begitu saja, ia harus direncanakan. Mutu harus menjadi bagian penting dari strategi institusi, dan harus didekati secara sistematis dengan menggunakan proses perencanaan strategis.

³⁰ Abu Choir, "Manajemen Mutu Terpadu", Modul Mata Kuliah Jurusan Kependidikan Islam, (Fakultas tarbiyah, IAIN Walisongo Semarang), hlm.1., t.d.

³¹ Husaini Usman, *Op.Cit.*, hlm.481.

Perencanaan strategis merupakan salah satu bagian penting dari *Total Quality Management (TQM)*. Tanpa arahan jangka panjang yang jelas, sebuah institusi tidak dapat merencanakan peningkatan mutu. Bahwa sebuah visi strategis yang kuat merupakan salah satu faktor kesuksesan yang penting bagi institusi manapun.³²

Edward Sallis mengatakan bahwa *Total Quality Management is a philosophy of continuous improvement, which can provide any educational institution with a set of practical tools for meeting and exceeding present and future customers needs, wants, and expectations.*³³

TQM adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan para pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang.

Mutu sekolah adalah mutu semua komponen yang dalam sistem pendidikan, artinya efektivitas sekolah tidak hanya dinilai dari hasil semata, tetapi sinergitas berbagai komponen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bermutu,³⁴ Maka usaha-usaha untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui beberapa cara, seperti :

- a. Meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian daerah yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat, sertifikasi kompetensi dan profil portofolio.
- b. Membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif.
- c. Menciptakan kesempatan belajar baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada jam-jam libur.

³²Edward Sallis, *op.cit.*, hlm. 211.

³³Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (London: Kogan Page, 1993), hlm. 34.

³⁴Aan Komariah dan Cipi Triatna, , *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),, hlm. 31.

- d. Meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasaan materi dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik.
- e. Membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan, bertindak sebagai sumber kontak informal tenaga kerja, membuat daftar riwayat hidupnya dan mengembangkan portofolio pencarian Pekerjaan.

TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Namun pendekatan TQM hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristiknya, yaitu: a) fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, b) memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas, c) menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, d) memiliki komitmen jangka panjang, e) membutuhkan kerja sama tim (*teamwork*), f) memperbaiki proses secara berkesinambungan, g) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, h) memberikan kebebasan yang terkendali, i) memiliki kesatuan tujuan, j) adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.³⁵

3. Pendidikan dan Pelanggan

Pelanggan adalah semua orang yang menuntut kita/institusi untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu, dan karena itu akan memberikan pengaruh pada performansi kita/institusi. Beberapa definisi tentang pelanggan yaitu:

- a. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang tergantung padanya.
- b. Pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya.

³⁵Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, *Op.Cit.*, hlm.4-5.

c. Tidak ada seorangpun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan.

d. Pelanggan adalah orang teramat penting yang harus dipuaskan.³⁶

Institusi pendidikan adalah sebagai pemberi jasa. Jasa-jasa ini meliputi pemberian beasiswa, penilaian dan bimbingan bagi para pelajar, para orang tua, dan para sponsor mereka. Para pelanggan terdiri dari bermacam-macam golongan dan perlu diidentifikasi. Pelanggan utama yaitu pelajar yang secara langsung menerima jasa. Pelanggan kedua yaitu orang tua, gubernur atau sponsor pelajar yang memiliki kepentingan langsung secara individu maupun institusi. Pelanggan ketiga yaitu pihak yang memiliki peran penting, meskipun tak langsung, seperti pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.³⁷

Gagasan lebih lengkap diungkapkan Lewis & Smith dikutip oleh Fandy Tjiptono dan Anastasia dalam buku *Total Quality Management*, keduanya mengajukan kerangka identifikasi pelanggan pada tiga perspektif, yaitu pelanggan internal (akademik dan administratif), pelanggan eksternal langsung, pelanggan eksternal tidak langsung. Pelanggan internal akademik meliputi siswa/murid, staf pengajar, program dan departemen/unit-unit yang mempengaruhi program tertentu (kurikulum, kesiswaan, humas dan keuangan). Pelanggan internal administrasi meliputi mahasiswa, karyawan dan unit, departemen atau bagian yang mempengaruhi suatu pelayanan atas aktifitas (ITU, service cleaning, dll). Pelanggan eksternal langsung terdiri atas *employers* siswa/murid dan sekolah atau lembaga lain yang menjadi penerima siswa/murid untuk studi lanjut atau jasa yang lain. Sedangkan pelanggan eksternal tidak langsung meliputi *legislature bodies*, masyarakat yang dilayani, BAN, alumni, keputusan dan operasi lembaga pendidikan.³⁸

³⁶ Vincent Gaspers, *Total Quality Management*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet.1, hlm.33.

³⁷ Edward Sallies, *loc. cit*, hlm. 68.

³⁸ Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana, *Loc.Cit.*, hlm. 38.

4. Konsep Peningkatan Mutu Pendidikan

a. Peningkatan mutu pendidikan

Pada era otonomi daerah, berbagai tantangan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan mengharuskan adanya reorientasi dan perbaikan sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, pelaksanaan konsepsi *school based management* dan *community based education* merupakan suatu keharusan. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan konsep manajemen sekolah yang memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab yang luas bagi sekolah berdasarkan profesionalisme untuk menata organisasi sekolah, mencari, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya pendidikan yang tersedia, serta memperbaiki kinerja sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah yang bersangkutan.³⁹

Dalam MBS sekolah dapat merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan sendiri kebijakan, program, dan kegiatan sekolah, sepanjang untuk memajukan institusi sekolah dan meningkatkan mutu pendidikannya. Oleh karena itu, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini kemudian dikenal dengan nama Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Sudah barang tentu sekolah tidak dapat melakukannya sendiri. Sekolah harus dapat menjalin dan bekerja sama dengan semua *stakeholder* pendidikan.⁴⁰

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain sebagai berikut; (a) lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (b) sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai, (c) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, (d) adanya harapan yang tinggi dari personel

³⁹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.51.

⁴⁰ Suparlan, *Membangun Sekolah Efektif*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), cet.I, hlm.30.

sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi, (e) adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK, (f) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu, dan (g) adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat.⁴¹

b. Prinsip-prinsip peningkatan mutu pendidikan

Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan diantaranya sebagai berikut.

- 1) Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan professional dalam bidang pendidikan.
- 2) Menghadapi “kegagalan sistem” yang mencegah dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada.
- 3) Peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan. Norma dan kepercayaan lama harus diubah. Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu.
- 4) Kunci utama peningkatan mutu adalah komitmen pada perubahan.
- 5) Profesional di bidang pendidikan harus berani melakukan perubahan dan tahu bagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan baru.
- 6) Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan.
- 7) Sistem pengukuran. Dengan pengukuran dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun masyarakat.

⁴¹ Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, <http://www.ssep.net/director.html>, Akses: 01/03/2010.

- 8) Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat.⁴²

Peningkatan mutu pendidikan, tidak dapat terlaksana tanpa pemberian kesempatan sebesar-besarnya pada sekolah yang merupakan ujung tombak terdepan untuk terlibat aktif secara mandiri mengambil keputusan tentang pendidikan. Sekolah harus menjadi bagian utama sedangkan masyarakat dituntut partisipasinya dalam peningkatan mutu yang telah menjadi komitmen sekolah demi kemajuan masyarakat.⁴³

Peningkatan mutu hanya akan berhasil jikalau ditekankan adanya kemandirian dan kreativitas sekolah. Proses pendidikan menyangkut berbagai hal diluar proses pembelajaran, seperti misalnya lingkungan sekolah yang aman dan tertib, misi dan target mutu yang ingin dicapai setiap tahunnya, kepemimpinan yang kuat, harapan yang tinggi dari warga sekolah untuk berprestasi, pengembangan diri, evaluasi yang terus menerus, komunikasi dan dukungan intensif dari pihak orang tua, masyarakat maupun komite sekolah sebagai wadah peran serta masyarakat.

⁴² Nana Syaodih Sukmadinata dkk., *Pengendalian mutu pendidikan sekolah menengah (konsep, Prinsip, dan instrument)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), Ce.II, hlm.10-11.

⁴³ Hasbullah, *Op.Cit.*, hlm.51